

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah dapat disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini memuat beberapa aspek yakni Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD, Penyelenggaran Dana Dekonsentrasi yang mencakup capaian pelaksanaan program, outcome program, Capaian Indikator Kinerja Daerah, Permasalahan dan Solusi serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.

Penulisan bahan LKPJ ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pada seluruh unit kerja dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejauh mana keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang sudah dilaksanakan selama tahun 2020 sehingga tergambar kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi prioritas yang akan dilaksanakan tahun selanjutnya.

Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Padang, Februari 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,

dto

HANSASTRI, SE,Ak, MM, CFrA

Pembina Utama Madya

NIP. 19641013 199103 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri atas susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - 2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - 3. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.
- d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
 - 3. Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

- f. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur wilayah; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan, dengan fungsi sebagai berikut :

 - 1. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
 - 2. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan

3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro, pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan; dan
3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.

c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Trantibbum Linmas, Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, Fungsi penunjang dan Fungsi Lainnya, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
2. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur; dan
3. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

d. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta data informasi informasi perencanaan pembangunan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

e. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kebencanaan, Pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
2. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
3. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, tata ruang dan lingkungan hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Jabatan Fungsional Perencana yang bertugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

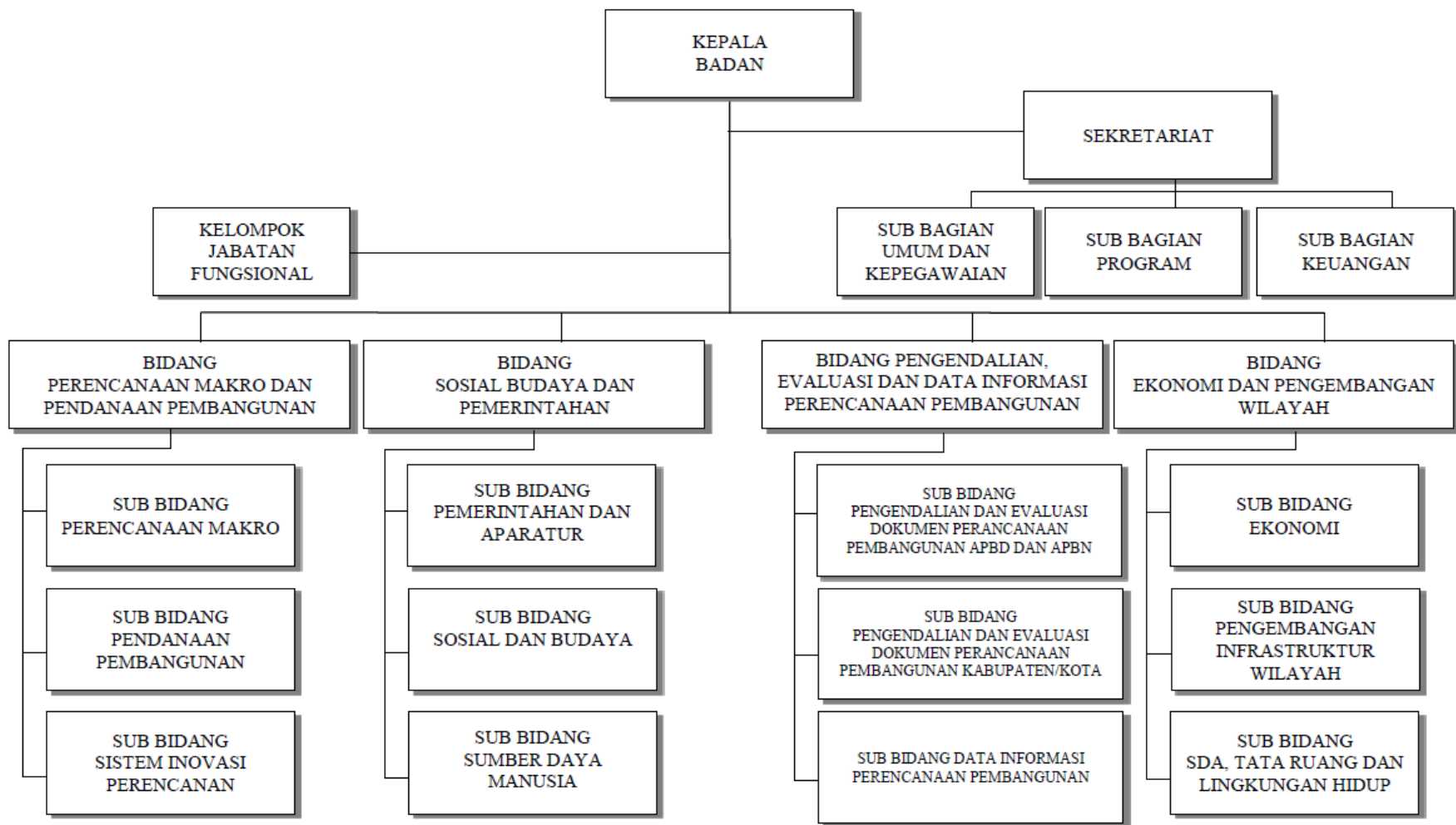
1. Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
2. Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
3. Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- a. Jabatan Kepala Badan, Eselon II a
- b. 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- c. 4 Jabatan Fungsional Perencana
- d. 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV a

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1.1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2020, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 89 orang yang terdiri atas 19 orang struktural, 62 orang fungsional umum dan 4 orang Fungsional Tertentu, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	2	2	4
3.	Eselon IV	8	6	14
4.	Fungsional Tertentu	1	3	4
5.	Fungsional Umum	36	26	62
6.	PTT	1	-	1
	Jumlah	49	37	86

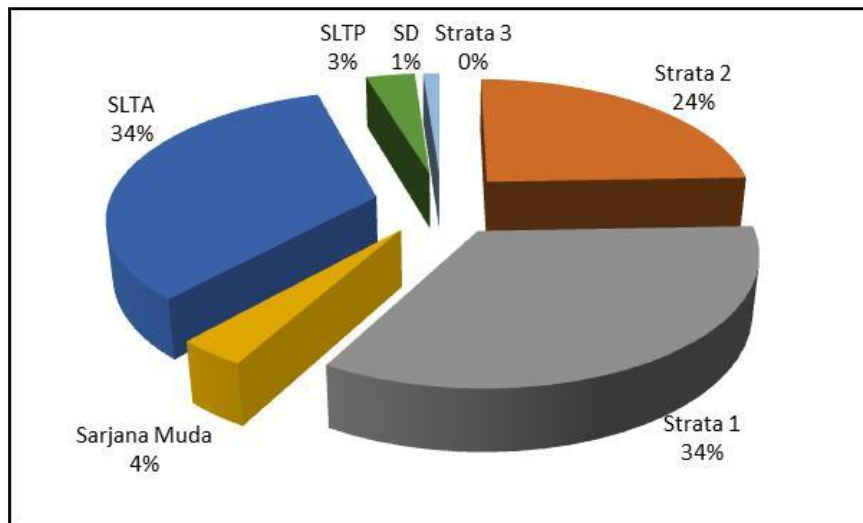
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional tertentu dibandingkan fungsional umum, dimana jabatan Fungsional Umum berjumlah 62 orang dan Fungsional Tertentu berjumlah 4 orang. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar dari pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	7	14	21
3.	Strata 1	15	14	29
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	SLTA	21	8	29
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	1	-	1
	Jumlah	48	38	86

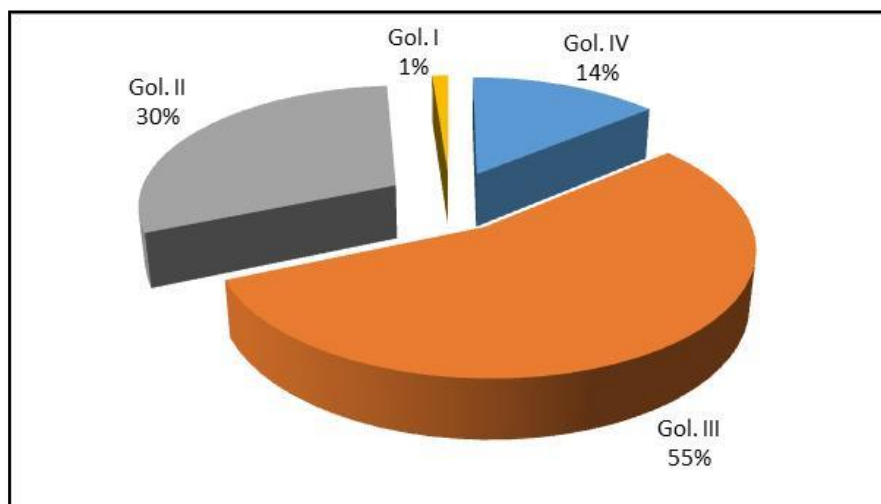
Grafik 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pada tahun 2020 kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 24% berpendidikan S2 atau sebanyak 21 orang, 34% berpendidikan S1 atau sebanyak 29 orang, 4% berpendidikan D3 atau sebanyak 3 orang, berpendidikan SLTA sebesar 34% atau sebanyak 29 orang, berpendidikan SLTP sebesar 3% atau sebanyak 3 orang dan berpendidikan SD sebesar 1% atau sebanyak 1 orang.

Sementara itu, kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan secara berurutan persentasenya adalah Gol. IV sebesar 14% atau sebanyak 12 orang, Gol. III sebesar 55% atau sebanyak 47 orang dan Gol. II sebesar 30% atau sebanyak 26 orang dan Gol. I sebesar 1% atau sebanyak 1 orang. Ini menunjukkan bahwa pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai Gol. III. Potret kekuatan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



3.1.5 Dukungan Sarana dan Prasarana

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dapat digambarkan kondisi rekapitulasi buku inventaris aset sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2020

Kelompok	Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
				Persil	Jumlah			
1.3			Aset Tetap			44.626.291.926,00	19.165.733.010,73	25.460.558.915,27
	1.3.1		Tanah			5.600.590.000,00	-	5.600.590.000,00
		01	Tanah	1	4.852	5.600.590.000,00	-	5.600.590.000,00
	1.3.2		Peralatan dan Mesin			16.944.624.121,00	15.253.362.796,00	1.691.261.325,00
		02	Alat-alat Besar		12	302.874.500,00	263.994.500,00	38.880.000,00
		03	Alat-alat Angkutan		129	3.324.993.556,00	2.733.128.556,00	591.865.000,00
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		38	390.729.350,00	374.292.120,00	16.437.230,00
		05	Alat Pertanian		2	15.148.000,00	15.148.000,00	-
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.469	12.249.633.035,00	11.266.935.384,00	982.697.651,00
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi		127	620.295.680,00	567.914.236,00	52.381.444,00
		08	Alat-alat Kedokteran		2	39.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00
		09	Alat Laboratorium		1	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	1.3.3		Gedung dan Bangunan			22.036.151.435,00	3.912.370.214,73	18.123.781.220,27
		11	Bangunan Gedung	1	3.500	22.036.151.435,00	3.912.370.214,73	18.123.781.220,27
	1.3.4		Aset Tetap Lainnya			44.926.370,00	-	44.926.370,00
		12	Buku Perpustakaan	-	401	44.926.370,00	-	44.926.370,00
1.5			Aset Lainnya			1.749.083.432,00	1.738.323.432,00	10.760.000,00
	1.5.3		Aset Tidak Berwujud			1.749.083.432,00	1.738.323.432,00	10.760.000,00
		01	Aset Tidak Berwujud	-	21	1.749.083.432,00	1.738.323.432,00	10.760.000,00
Total Harga						46.375.375.358,00	20.904.056.442,73	25.471.318.915,27
Dibulatkan						46.375.375.358,00	20.904.056.443,00	25.471.318.915,00

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2020

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi APBD pada tahun 2020 sebesar Rp. 11.175.635.881,- dengan realisasi Rp. 10.922.613.230,- atau sebesar 97,74% dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	1.1	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan	100%	100%
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra		
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja		
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD		
			- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS		
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	2.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB

Dicapai dalam bentuk pelaksanaan Program sebagai berikut :

Program		Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.027.134.125	Rp. 2.976.925.769
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 636.951.314	Rp. 634.512.689
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 67.500.000	Rp. 67.498.200
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 1.220.000	Rp. 1.125.000

Program		Anggaran	Realisasi
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 401.063.083	Rp. 395.122.507
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.278.368.923	Rp. 1.257.928.047
7.	Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan	Rp. 210.624.628	Rp. 205.560.003
8	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 5.552.773.808	Rp. 5.552.773.808
JUMLAH		Rp. 11.175.635.881	Rp. 10.922.613.230

Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dapat dicapai 100% dengan indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Sedangkan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja telah tercapai 100% ,hal ini tertuang dalam perolehan nilai LAKIP Bappeda tahun 2019 dengan predikat BB (72,51).

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Benda Pos materai 6000 dan 3000 dan Honor Pegawai PTT (12 Bulan)	12 Bulan	100	39.980.000	39.980.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, kawat, faksimili, internet serta lisensi zoom meeting (1 tahun)	1 tahun	100	919.000.000	893.081.646	97,18

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
3	Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor (11 unit)	11 unit	100	69.295.000	69.011.327	99,59
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor		Tersedianya jasa Petugas dan peralatan Kebersihan Kantor - Tersedianya jasa Sopir Kantor - Tersedianya jasa Petugas dan peralatan keamanan Kantor (12 bulan)	12 bulan	100	902.370.000	883.791.767	97,94
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor (12 bulan)	12 bulan	100	48.681.583	35.951.284	73,85
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya pencetakan dan penggandaan (12	12 bulan	100	35.951.284	35.891.034	99,83

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			bulan)					
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor (12 bulan)	12 bulan	100	5.930.545	5.924.145	99,89
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku	6 jenis Koran, 1 majalah dan buku	100	32.040.000	32.004.000	99,89
9	Penyediaan Makanan dan Minuman		rapat/pertemuan yang diselenggarakan (12 bulan)	12 bulan	100	50.000.000	49.952.000	99,90
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti (12 bulan)	12 bulan	100	820.140.753	815.498.694	99,43
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur		terlaksananya wirid - terlaksananya kegiatan senam	12 bulan	100	103.744.960	103.121.360	99,40

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			(12 bulan)					
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (12 bulan)	12 bulan		112.563.750	112.534.323	99,97
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor (12 bulan)	12 bulan		180.000.000	179.905.580	99,95
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Pemeliharaan kendaraan operasional (11 unit)	11 unit		83.102.364	81.474.886	98,04
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Telaksananya pemeliharaan AC, Tabung Pemadam kebakaran dan mesin pompa air beserta suku	12 bulan		32.500.000	32.415.000	99,74

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			cadang (12 bulan)					
5	Rehab Sedang Berat Gedung Kantor		Gedung Kantor yang di perbaiki (1 unit)	1 unit		19.885.200	19.769.000	99,42
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi		Perbaikan Sound System, Telepon, Faximile, CCTV dan jaringan, Kamera dan Projector (12 bulan)	12 bulan		13.000.000	12.995.400	99,96
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi		Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer, scan dan Jaringan Komputer (12 bulan)	12 bulan		30.000.000	29.918.500	99,73
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		Tersedianya komputer, laptop dan printer	3 unit, 4 unit dan 3 unit		165.900.000	165.500.000	99,76

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas	90 Stel		67.500.000	67.498.200	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang		1.220.000	1.125.000	92,21
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP	3 Dokumen		65.444.050	62.910.577	96,13

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda)					
2	Penatausahaan Keuangan SKPD		Tersedianya honorarium PA; KPA; PPK; PPTK; dan pengelola keuangan lainnya (12 bulan)	12 bulan		254.000.000	252.050.000	99,23
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Tersusunnya Renja, DPA dan DPPA	3 Dokumen		38.659.033	37.201.930	96,23
4	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD		Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD (12 bulan)	12 bulan		42.960.000	42.960.000	100,00
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen		Tersedianya hasil Musrenbang	1 dokumen, 10		19.926.600	19.520.661	97,96

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Perencanaan		RKPD Tahun 2020 (1 dokumen, 10 buku laporan)	buku laporan				
2	Penyusunan KUA / PPAS APBD		Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2021 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020	2 Dokumen, 1385 buku		209.096.600	209.074.483	99,99
3	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (7 modul)	7 modul		571.325.274	559.080.501	97,86
4	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta		Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Book) 20 buku	20 buku		17.629.749	16.381.532	92,92
5	Penyusunan RKPD		Buku RKPD Tahun	2 Dokumen, 380		283.522.450	282.689.386	99,71

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			2021 dan RKPD Perubahan 2020 (2 Dokumen, 380 buku)	buku				
6	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdistribusikan ke kabupaten/kota 2 dokumen (RKPD, EKPD)	2 dokumen (RKPD, EKPD)		31.000.000	31.000.000	100,00
7	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana		Jumlah Aparatur Fungsional perencana yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pertemuan, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan even nasional secara	3 orang		4.788.800	4.699.050	98,13

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			online dan offline (3 orang)					
8	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		Tersedianya Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (1 Jenis Dokumen)	1 Jenis Dokumen		141.079.450	135.482.434	96,03
VII	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan							
1	Pengelolaan website www.bappedasumbar.go.id		Updating berita pada website bappeda.sumbar prov.go.id (12 bulan)	12 bulan		49.960.000	49.583.127	99,25
2	Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan		Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan	1 laporan		8.188.400	8.180.805	99,91

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			pembangunan Sumatera Barat					
3	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pembangunan		- Terlaksananya Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat (2 kali) - Terupdatenya Sistem Database Pembangunan Daerah (www.edatabase sumbarprov.go.id) 1 Aplikasi	- 2 kali, 4 kali meeting online/webinar - 1 Aplikasi		152.476.228	147.796.071	96,93
VIII	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional		1.Laporan kerjasama ekonomi regional dan internasional	1 Dokumen (5 buku), 1 kali , 1 kali, 2 Negara, 8 Kementerian		374.116.579	359.936.149	96,21

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			2.Mengikuti Rakorgub Se-Sumatera 3.Mengikuti Rapat Teknis Rakorgub se Wilayah Sumatera 4.Mengikuti kegiatan IMT-GT					
2	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs		Terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat (1 laporan)	1 laporan SDGs		18.315.126	16.916.337	92,36
3	Harmonisasi Program / Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah		Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (1	1 dokumen		42.975.917	27.543.863	64,09

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			dokumen)					
4	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)		Perencanaan dan Implementasi program IPDMIP yang terkoordinasi (1 dokumen)	1 dokumen		2.336.283.000	2.318.879.526	99,26
5	Harmonisasi Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Tersedianya buku laporan pelaksanaan (1 laporan)	1 Laporan		20.314.282	20.314.282	100,00
6	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Jumlah buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019 (1 buku (65 Eksemplar)	1 buku (65 Eksemplar)		77.744.830	68.715.161	88,39
7	Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006		Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas 4 Triwulanan (20	4 Triwulanan (20 Eksemplar)		14.298.400	14.198.866	99,30

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			Eksemplar)					
8	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi		Dokumen perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron (1 dokumen)	1 dokumen		170.646.701	170.634.991	99,99
9	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Jumlah rapat Evaluasi Dokumen Perencanaan	8 kali		126.562.528	125.426.508	99,10
10	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan		Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron (1 dokumen)	1 dokumen		25.801.721	25.288.161	98,01

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
11	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha		Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron (1 dokumen)	1 dokumen		14.629.450	14.580.938	99,67
12	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		Terlaksananya Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (1 dokumen)	1 dokumen		128.535.600	127.188.203	98,95
13	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 laporan		15.350.956	15.346.995	99,97

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			(GRK) 1 laporan					
14	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilyahan		- Dokumen Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron - Tersusunnya Ranperda Pembangunan infrastruktur Berkelanjutan (1 dokumen)	1 Dokumen		142.712.450	141.770.945	99,34
15	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman		Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan (1	1 Dokumen		41.183.200	36.507.790	88,65

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			dokumen)					
16	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air		Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Air, TKPSDA, dll) (1 dokumen)	1 Dokumen		13.334.400	13.004.555	97,53
17	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		Rancangan RKPD lingkup Bidang Pembangunan social Budaya dan Pemerintahan - Hasil verifikasi pemetaan program - verifikasi rancangan Renja awal SKPD 2021 - Rancangan akhir Renja SKPD 2021 - Rancangan	4 dokumen		512.508.200	503.263.238	98,20

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			Renja Perubahan SKPD 2020 - Rapat koordinasi Terkait Penyusunan Perencanaan dan penganggaran lingkup Bidang social dan Budaya - Laporan kegiatan					
18	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya		-Sasaran Pembangunan Sub Bidang social Budaya yang tercapai (1 laporan)	1 laporan		54.635.950	54.301.706	99,39
19	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintah dan Aparatur		- Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang tercapai (1 laporan)	1 laporan		54.090.368	53.418.413	98,76

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
20	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia		Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumberdaya manusia yang tercapai (1 dokumen)	1 dokumen		40.556.500	40.480.141	99,81
21	Pelaksanaan Pokja Air dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)		1. Kab/ kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi; 2. Kab pelaksana pamsimas yang terfasilitasi	1 kali, 12 Kabupaten		45.772.000	45.513.750	99,44
22	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan		Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Tersusunnya laporan koordinasi (1 kali, 12 Kabupaten)	1 dokumen		51.013.926	48.603.264	95,27
23	Harmonisasi Program/ Kegiatan		terlaksananya pemantauan	4 Kabupaten		43.631.451	41.311.985	94,68

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pangan dan Gizi		pelaksanaan program/kegiatan pangan dan gizi (4 Kabupaten)					
24	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten Kota		- Jumlah Renja yang dievaluasi -Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi -Jumlah RPJPD dan RPJMD Kab./Kota yang dievaluasi (50 renja, 19 Kab./Kota, 2 Kabupaten/Kota)	50 renja, 19 Kab./Kota, 2 Kab./Kota		341.428.756	335.877.198	98,37
25	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat		GAP/GBS OPD Provinsi yang diverifikasi ; Rakor Pelaksanaan RAD PUG (1 dokumen	1 dokumen GAP/GBS; 3 kali Rakor		232.188.294	231.293.688	99,61

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
			GAP/GBS; 3 kali Rakor)					
26	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah		Mengikuti Rakortek Tingkat Pusat (1 dokumen)	1 dokumen		76.206.805	76.146.433	99,92
27	Peningkatan Kapasitas TKPK Daerah		Meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota (1 laporan)	1 Laporan		1.944.261	1.944.261	100,00
28	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Revisi Perda RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (1 dokumen)	1 dokumen		172.943.257	101.497.467	58,69
29	Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)		Perencanaan dan implementasi program PHJD yang terkoordinasi (1 dokumen)	1 dokumen		363.048.900	354.036.201	97,52

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
1	Harmonisasi Program/ Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Serapan anggaran berada dibawah 90% dengan jumlah anggaran Rp 42.975.917,00 terealisasi sebesar Rp 27.543.863,00 atau 64,09 %. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang semula direncanakan tidak terlaksana secara maksimal karena jumlah peserta yang direncanakan sebelumnya dari OPD provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota yang menyanggupi untuk dilakukan tatap muka kurang dari 5 % karena berkaitan dengan maraknya pandemi covid-19 di tahun 2020	Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilakukan secara daring	
2	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Serapan anggaran berada dibawah 90% dengan anggaran Rp. 77.744.830 teralisasi sebesar Rp. 68.715.161 atau sebesar 88,39%.Hal ini berkaitan dengan pandemi Covid 19 dimana waktu pelaksanaan penyusunan buku EKPD yang semula dijadwalkan bersama	Sesuai ketentuan, pembayaran belanja jasa tenaga ahli sebagai tim penulis hanya dibayarkan 80 % dari standar harga yang berlaku, tidak dapat dibayarkan secara utuh karena pengerjaannya kurang dari lima	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		dengan Tim Ahli pelaksanaannya menjadi kurang dari lima bulan. Sesuai ketentuan pembayaran belanja jasa tenaga ahli sebagai tim penulis adalah 80 % dari standar harga yang berlaku. Terdapat sisa anggaran pada rekening belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	bulan sehingga terdapat sisa anggaran pada rekening belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	
3	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Serapan berada dibawah 90% dari jumlah anggran Rp 41.183.200 terealisasi sebesar Rp 36.507.790 atau 88,65 %. Sisa anggaran ini berada pada akun perjalanan dinas yang tidak bisa dimanfaatkan karena pengaruh Pandemi Covid-19	Sisa anggaran adalah belanja perjalanan dinas yang memang tidak bisa dimanfaatkan	
4	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Serapan berada dibawah 90% dimana jumlah anggaran Rp 172.943.257 terealisasi sebesar Rp 101.497.467 atau 58,69 %. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan terkait dengan DPRD dimana semula jadwal Penetapan Perda Revisi RPJPD adalah tanggal 23 Desember 2020 namun kemudian diputuskan bahwa Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2025 tidak jadi ditetapkan di	Kegiatan ini dianggarkan kembali di Tahun 2021	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		tahun 2020, sehingga sisa anggaran adalah pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja cetak		

2.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2020 sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peralihan penggunaan sistem e-planing ke SIPD Kemendagri	Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Pelaksanaan dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang sudah harus diterapkan dalam perencanaan Tahun 2021
CONTOH : dilakukan pemetaan kegiatan untuk tahun 2021 yang sudah tertuang dalam eplanning sehingga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 70 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga dapat dituangkan dalam SIPD Kemendagri			

Seiring dengan harus diberlakukannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan yang mengurus perencanaan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Peraturan tersebut dalam dokumen perencanaan di tahun 2020. Dengan diwajibkannya Pemerintah Daerah untuk memakai SIPD Kemendagri dalam perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 maka e-planning yang

biasa digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

N o	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH			
1	Pemerintah Daerah perlu menata kembali program dan kegiatan pembangunan daerah disisa waktu masa jabatan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan agar diprioritaskan pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016-2021. Pada Perubahan APBD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021, alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan yang target kinerjanya masih di bawah yang ditetapkan dalam RPJMD.	Telah dilakukan penyempurnaan pada RKPD dan Renja Tahun 2021 dengan dukungan kebijakan dan komitmen dari pengambil keputusan untuk penyusunan perencanaan TA 2021 pada Tahun 2020	Untuk memprioritaskan Program dan kegiatan yang target kinerjanya masih di bawah yang ditetapkan dalam RPJMD untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016-2021.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
2	Pemerintah Daerah perlu menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah antar wilayah sesuai dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.	Program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas pada TA 2020 untuk penyusunan perencanaan TA 2021 disamping core utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar adalah untuk Penanganan dan Pemulihan Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat	Untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah antar wilayah sesuai dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah
3	Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diprioritaskan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, sehingga terdapat pemerataan dan keadilan pembangunan daerah.	Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020). 80% dari Bantuan Keuangan bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD, tentu saja diharapkan komitmen dari anggota DPRD untuk mengalokasikan pikirnya untuk daerah yang kemampuan fiskalnya rendah dengan mempedomani Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2020, tentang Tatacara Pemberian Bantuan Keuangan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kemampuan fiskal rendah diprioritaskan untuk Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Provinsi untuk dapat membantu terjadinya pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
4	Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang jelas dalam bentuk program dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan pada daerah tertinggal agar daerah tersebut dapat keluar dari ketertinggalannya.	Komitmen dari Pemerintah Daerah dipandang sangatlah perlu dalam penyusunan program dan alokasi anggaran sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sesuai dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, target pengentasan seluruh daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat adalah pada Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD 2021	Agar Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dapat lepas dari dari tertinggal di tahun 2021
TUGAS PEMBANTUAN			
1	Tidak bersinerginya kegiatan pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Balai Sungai dengan Dinas PSDA.	- Bappeda Prov. Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat untuk melakukan inventarisasi sungai-sungai yang rawan bencana terhadap irigasi-irigasi kewenangan pusat (tugas pembantuan), serta melakukan perencanaan penanganannya dengan melakukan sinergi dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan menyampaikan usulan APBN melalui Aplikasi Krisna Selaras Bappenas	Memaksimalkan pengangan pengelolaan sungai untuk menghindari terjadinya bencana
2	Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari tugas pembantuan. Kondisi ini berdampak terhadap banyaknya	Telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dengan terus meningkatkan koordinasi dengan OPD pelaksana	Memaksimalkan pemanfaatan Dana yang bersumber dari Pusat agar lebih maksimal dan

N o	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	pekerjaan yang bersumber dari tugas pembantuan yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.	kegiatan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN	bermanfaat

b. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

N o	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
TUGAS PEMBANTUAN			
1	Tidak bersinerginya kegiatan pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Balai Sungai dengan Dinas PSDA.	- Bappeda Prov. Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat untuk melakukan inventarisasi sungai-sungai yang rawan bencana terhadap irigasi-irigasi kewenangan pusat (tugas pembantuan), serta melakukan perencanaan penanganannya dengan melakukan sinergi dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan menyampaikan usulan APBN melalui Aplikasi Krisna Selaras Bappenas	Memaksimalkan pengangan pengelolaan sungai untuk menghindari terjadinya bencana
2	Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari tugas pembantuan. Kondisi ini berdampak terhadap banyaknya	Telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dengan terus meningkatkan koordinasi dengan OPD pelaksana	Memaksimalkan pemanfaatan Dana yang bersumber dari Pusat agar lebih maksimal dan

N o	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	pekerjaan yang bersumber dari tugas pembantuan yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.	kegiatan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN	bermanfaat

c. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
FRAKSI GERINDRA			
1	Fraksi Partai Gerindra sepakat dengan Pansus bahwa Pemerintah Daerah perlu menata kembali program dan kegiatan pembangunan daerah disisa waktu masa jabatan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan agar diprioritaskan pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016-2021.	Telah dilakukan penyempurnaan pada RKPD dan Renja Tahun 2021 dengan dukungan kebijakan dan komitmen dari pengambil keputusan untuk penyusunan perencanaan TA 2021 pada Tahun 2020	Untuk memprioritaskan Program dan kegiatan yang target kinerjanya masih di bawah yang ditetapkan dalam RPJMD untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016-2021.
2	Perlunya Recovery Ekonomi pada KUA-PPS 2020-2021. Kami meminta agar recovery ekonomi ini menjadi prioritas.	Recovery Ekonomi merupakan core utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar pada tahun 2021, hal ini sejakan dengan RKP Nasional untuk Penanganan dan Pemulihan Pandemi	Pemulihan ekonomi untuk menjaga stabilitas perekonomian di Sumatera Barat

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Covid-19	
FRAKSI DEMOKRAT			
1	Dari penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2019, cukup banyak target-target kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai, diantaranya APM SD/SMP, pemerataan kualitas kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Tidak tercapainya beberapa target kinerja tersebut, salah satunya disebabkan tidak konsistennya Pemerintah Daerah mengalokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan target kinerja pembangunan daerah. Banyak proyek strategis yang tidak masuk dalam RPJMD dan memerlukan anggaran yang cukup besar yang berdampak terhadap berkurangnya alokasi anggaran untuk program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Ke depan, Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen untuk melaksanakan program yang betul-betul sejalan dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.	Perencanaan dan Penganggaran tahun 2021 mempedomani target-target RPJMD termasuk juga hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu serta menjaga konsistensi dan menyepakati dengan SKPD terkait (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) untuk pencapaian target kinerja pembangunan yang sudah tercantum dalam RPJMD	Konsistensi penganggaran dengan dokumen perencanaan
2	Program pembangunan ekonomi daerah yang diselenggarakan pada tahun 2019, belum memberikan efek terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi program di sektor perekonomian ini dan melakukan revitalisasi program	Sudah dilakukan identifikasi program dan kegiatan eksisting serta penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dan dituangkan dalam penganggaran 2021	revitalisasi program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	yang betul-betul terkait dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	dengan memperhatikan dukungan anggaran	
3	Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih terjadi hampir di semua sektor. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan antar wilayah perlu menjadi perhatian agar terwujud keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.	Telah dilakukan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan untuk pembangunan antar wilayah dengan memperhatikan kewenangan provinsi dan menjadikannya salah satu prioritas pada TA 2020 untuk penyusunan perencanaan TA 2021 disamping core utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar adalah untuk Penanganan dan Pemulihan Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat	Untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah antar wilayah sesuai dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah
FRAKSI NASDEM			

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan OPD tahun 2019, maka target utama makro pembangunan daerah tahun 2019 telah dapat diwujudkan, diantaranya IPM sebesar : 72,39, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar : 8,92 tahun, Angka Harapan Hidup sebesar : 69,31 tahun dan Angka Pengangguran sebesar 5,33 %. Namun demikian, masih terdapat target utama yang belum dapat direalisasikan, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, baru bisa di capai sebesar 5,05%, Angka Kemiskinan sebesar 6,29 % dan PDRB Perkapita sebesarRp. 45,29 juta.	Sudah dilakukan identifikasi program dan kegiatan eksisting serta penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dan dituangkan dalam penganggaran 2021 dengan memperhatikan dukungan anggaran. Namun dengan adanya pandemi yang melanda hampir di seluruh belahan dunia menyebabkan hancurnya perekonomian sehingga terjadi pergeseran target pembangunan di 2021 yang menggeser juga fokus pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga target utama yang belum dapat direalisasikan juga akan berpengaruh untuk dicapai	Pencapaian target utama makro pembangunan daerah
2	DPRD selain sebagai lembaga legislatif, juga memiliki fungsi Pengawasan, untuk itu kami berharap agar pemerintah bisa memberikan Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran secara berkala setiap triwulan. Dengan demikian, Anggota DPRD bisa melaksanakan fungsi pengawasan lebih optimal sesuai Tupoksi DPRD.	Telah dikoordinasikan dengan OPD terkait pengampu pelaporan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran secara berkala diteruskan ke Sekretariat DPRD	Memaksimalkan fungsi pengawasan sesuai Tupoksi DPRD

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
3	Rekomendasi-rekomendasi yang di berikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur tentang LKPJ, seyogianya ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dan dijadikan bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang.	Setiap catatan rekomendasi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mendukung perbaikan kinerja Gubernur akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
FRAKSI PDIP			
1	Masalah daerah tertinggal, dapat kita ketahui bahwa di Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu terdapat tiga (3) daerah tertinggal (Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan dan Kab. Kep. Mentawai) dan pada tahun 2020 ini hanya tinggal satu daerah lagi yaitu Kab. Kep. Mentawai. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dalam hal ini meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu adanya strategi khusus menanganinya karena Kab. Kep. Mentawai mempunyai latar belakang kultur/kebudayaan yang berbeda yang menurut Fraksi kami selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lalai akan hal ini.	Setiap tahunnya Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasar pada kebutuhan dan latar belakang kultur/kebudayaan Daerah Tertinggal dalam wujud Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) yang pada tahun ini dilakukan melalui Sistem Informasi Percepatan	Agar Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dapat lepas dari dari tertinggal dan Sumatera Barat bebas dari daerah tertinggal

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD). Sehingga Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dapat mengawal usulan program dan kegiatan yang diusulkan melalui SIPPD agar dapat tertampung dalam APBD dan APBN Tahun 2021 untuk penyusunan perencanaan tahun 2022.	

2.4 Penghargaan Yang Diterima

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada penghargaan yang diterima selama Tahun 2020.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dengan tujuan untuk mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional. Sampai dengan akhir kinerja Tahun 2020, serapan dana dekonsentrasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 380.599.780,- atau mencapai 98,67% dari total anggaran sebesar Rp. 385.727.000,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	385.727.000	380.599.780	98,67	5.127.220
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang				
A.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional	66.618.000	64.263.300	96,47	2.354.700
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	51.938.000	50.383.300	97,01	1.554.700
2	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	6.840.000	6.140.000	89,77	700.000
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	7.840.000	7.740.000	98,72	100.000

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
B	Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	206.260.000	204.378.980	99,09	1.881.020
1	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	198.420.000	196.638.980	99,10	1.781.020
2	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	7.840.000	7.740.000	98,72	100.000
C	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	112.849.000	111.957.500	99,21	891.500

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi urusan pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas di daerah Tahun Anggaran 2020 secara prinsip tidak menemui kendala yang berarti, dengan masih meningkatnya Pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya di Sumatera Barat pelaksanaan kegiatan yang telah diamanahkan melalui dana dekonsentrasi tahun 2020 dapat dilaksanakan setelah dilakukan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.